

SOSIALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

Natasha Julia Djami, Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Natashaajulia93@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

In this article, it was made with the aim that people who read it can understand how to apply criminal sanctions to various types of violations committed by TNI soldiers. The Military Criminal Law, which was formed to be able to prosecute perpetrators of criminal offenses, especially against TNI soldiers. Military Criminal Law is included in the special criminal law because the criminal law only applies to certain legal subjects. Military Criminal Law is regulated in the KUHPM or the Military Criminal Law Code. If a TNI soldier who is based on his authority is tried in a military trial, then of course the TNI soldier must submit to the provisions of the power of the judiciary in a military trial. The military court is a place to exercise judicial power in the Armed Forces to uphold law and justice with the aim of paying attention to the interests of defense in the defense of national security. Therefore, the purpose of this community service is of course to socialize about a deeper understanding of the application of criminal sanctions against TNI soldiers in the community. Therefore, it is hoped that this socialization will make society more open to law enforcers so that every type of crime committed by TNI soldiers needs to be subject to fair and strict sanctions.

Keywords: TNI Soldiers, Sanctions, Society.

Abstract

Pada tulisan ini, dibuat bertujuan agar masyarakat yang membaca dapat memahami tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap berbagai macam pelanggaran yg dilakukan oleh prajurit TNI. Hukuman Pidana Militer yang sebagaimana dibentuk untuk dapat mengadili pelaku pelanggaran pidana khususnya terhadap prajurit TNI. Hukum Pidana Militer termasuk dlm hukum pidana khusus krna hukum pidana tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu. Hukum Pidana Militer diatur di dalam KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jika prajurit TNI yg berdasarkan kewenangannya diadili dlm peradilan militer, maka tentu prajurit TNI tersebut harus tunduk pada ketetapan kekuasaan kehakiman di peradilan militer. Peradilan militer adalah tempat mengadili perkara atas dasar kekuasaan kehakiman pada angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum & keadilan dgn tujuan untuk memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pd pertahanan keamanan n3gara. Maka dari itu, tujuan dari pengabdian masyarakat ini tentu agar mensosialisasikan tentang pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dgn adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat membuat masyarakat untuk lebih terbuka terhadap penegak hukum sehingga setiap berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI perlu dikenakan sanksi yang adil dan setegas-tegasnya.

Keywords: Prajurit TNI, Sanksi, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam aturan hukum positif yang

berlaku untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Tujuan dari aturan hukum positif yang perlu dicapai yakni terciptanya

ketertiban masyarakat berdasarkan pada penegakan hukum sehingga masyarakat merasa aman dan damai. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk upaya untuk menciptakan keamanan salah satunya dengan membentuk suatu sistem keamanan atau pertahanan negara yang dimana termasuk dalam bentuk keamanan nasional. Dalam bidang pertahanan yang ada tentunya memiliki tugas yaitu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta menjaga keutuhan wilayah negara. Selain daripada itu, bidang pertahanan tersebut memiliki fungsi lain yaitu sebagai aparatur pertahanan sebagaimana yang dimaksud bahwa fungsi ini dimiliki oleh militer Indonesia yaitu Tentara Indonesia (TNI).

Tentara Indonesia atau TNI bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dibutuhkan peran serta fungsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia yang dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi para anggota Tentara Indonesia agar terciptanya sebuah kekuatan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa sering terjadi berbagai macam permasalahan yang datang dari kalangan anggota Tentara Indonesia dalam perihal menjalankan tugas dengan ketentuan hukum yang berlaku contohnya bisa pada anggota yang melakukan berbagai macam tindak pidana yang dimana dapat memberikan dampak buruk pada dirinya sendiri dan juga bisa berpengaruh pada masyarakat. Berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh anggota Tentara Indonesia akan dikhususkan pada aturan pidana militer yang berlaku. Pada hukum pidana yang memuat berbagai macam perbuatan pidana, pelaku yang melakukan perbuatan pidana serta berbagai macam aturan yang dijatuhkan

kepada pelanggaran hukum. Hukum tentunya bersifat adil dan tidak membedakan kalangan dari pelanggar hukum baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah semuanya sama di mata hukum. Maka dari itu, siapapun yang melakukan tindak pidana pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada permasalahan yang di timbulkan oleh para anggota Tentara Indonesia tentu berdampak pada pertanggungjawabannya dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang perlu ditegakkan tentu harus memenuhi persyaratan aturan hukum yang berlaku karena anggota Tentara Indonesia yang bisa disebut juga sebagai abdi negara tentu harus berperan menjadi anggota yang baik sehingga terciptanya keamanan, kedamaian serta ketentraman yang tentu sangat diharapkan oleh negara.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional pada bulan Juni 2023 dengan melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerepan tindak pidana yang baik dan benar khususnya terhadap oknum Tentara Indonesia yang melakukan tindak pidana sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, tentunya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang ditimbulkan oleh para anggota Tentara Indonesia demi terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat khususnya di negara kita Indonesia.



Gambar 1.1 Sosialisasi mengenai penerapan sanksi pidana pada pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI.

HASIL

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana dapat melawan hukum serta sanksi yang didapat juga diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu perbuatan pidana yang dilakukan oleh personil TNI memiliki aturan hukumnya tersendiri yaitu hukum pidana militer. Hukum pidana militer adalah sebuah bidang dari ilmu hukum yang mengatur berbagai macam pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Hukum pidana militer fokus pada aturan yang telah disahkan oleh pengadilan militer di Indonesia yg berkaitan dengan konflik bersenjata & juga berbagai macam kejahatan kekerasan lainnya. Pengadilan militer sangat sering menangani kejahatan yang cukup serius contohnya seperti eksekusi di luar proses hukum, eksekusi singkat, penahanan, pencambukan, ganung, penjara dan juga kurungan tersendiri. Tentu dalam kasus yang melibatkan anggota dari angkatan bersenjata, tentu pelaku dapat menghadapi hukuman sampai dengan 15 tahun penjara. Pelanggaran yg paling umum sering dilanggar yaitu perzinahan, disersi, alternatif, pencurian hingga perampokan bersenjata. Selain itu, tuduhan kecil lainnya dapat dihukum satu atau bisa jg dua tahun penjara. Peraturan perundang-undangan di dalam

militer tentu memberikan pertanggungjawaban kepada anggota angkatan bersenjata. Dalam hal tersebut jg menetapkan prinsip serta prosedur yang mengatur pengadilan untuk kejahatan yang berat yang dilakukan pada masa konflik. Selain daripada itu, hukum pidana militer dapat berusaha melindungi juga membela hak-hak setiap orang yg termasuk ke dalam seluruh kelas sosial.

Hukum pidana militer umumnya memberikan hukuman kepada personil militer yang telah melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan dalam perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran pada hak asasi manusia serta pelanggaran terhadap kode etik militer. Adapun tujuan dari hukum pidana militer di Indonesia adalah untuk memberikan keselamatan negara dan memberikan keadilan kepada mereka yang menjadi korban tindakan melawan hukum angkatan bersenjata.



Gambar 1.2 Persidangan terhadap TNI yang melakukan pelanggaran pembunuhan di Pengadilan Milliter III-14 Denpasar.

Berikut adapun tujuan lainnya dari hukum pidana militer yaitu :

1. Menjaga Kedisiplinan serta Ketertipan

Tujuan ini yakni bertujuan untuk menjaga kedisiplinan serta ketertipan. Hukum pidana militer itu sendiri dibuat untuk menjaga kedisiplinan serta ketertipan

di wilayah lingkungan militer dengan guna memastikan bahwa personil militer harus mematuhi peraturan tata tertib yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban operasi militer.

2. Mencegah Bentuk

Pelanggaran Terhadap Keamanan Nasional

Hukum pidana militer dibuat guna agar mencegah dan menghukum berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap keamanan nasional. Hal ini meliputi kejahatan-kejahatan seperti penghianatan, pengungkapan rahasia negara (spionase) yang tentunya dapat membahayakan kepentingan nasional.

3. Mempertahankan Integritas & Kepercayaan Masyarakat

Hukum pidana militer tentu bertujuan untuk menjaga integritas & kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Dengan diberlakukannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam hukum pidana militer, diharapkan agar tetap terjaganya citra serta reputasi militer sebagai lembaga yg bertanggung jawab hingga dapat dipertahankan.

4. Menjaga Persiapan dalam Pertempuran

Dalam hukum pidana militer, memiliki tujuan untuk menjaga kesiapan dalam persiapan pertempuran personil militer. Dengan diberlakukannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran

hukum pidana militer, tentu diharapkan setiap personil militer dapat menjalankan tugas mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat efektivitas pada kekuatan militer.

5. Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan

Terhadap Hukum Pidana militer itu sendiri dalam hal ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap hukum bagi personil militer. Hal ini tentu melibatkan pada proses pengadilan yang adil, yang dimana hak setiap individu harus dihormati serta keputusan yang telah diberikan harus berdasarkan pada bukti dan prosedur yang sesuai. Selain itu, adapun beberapa aspek dalam hukum pidana yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Sistem Peradilan Militer

Sistem ini memiliki prosedur khusus yang berkaitan dengan hukum pidana militer dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di lingkungan militer.

2. Penegakan Hukum Yang Adil

Aspek kedua yaitu penegakan hukum yang adil. Dalam aspek ini, diperlukannya mekanisme mengenai pengawasan dan ketelitian yg baik agar dapat memastikan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat

- dilakukan dengan adil & dapat mengaja keadilan.
3. **Macam-Macam Tantangan dalam Penegakan Hujum Pidana Militer**
Hukum pidana militer tentu banyak sekali menghadapi berbagai macam tantangan khusus seperti penyedilikan yang sulit dlm konteks militer, melakukan interakksi dgn hujum sipil, & penegakan hukum yg adil serta efektif di lingkungan anggota bersenjata. Dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan kebutuhan agar terjaganya keseimbangan antara kepentingan dalam militer juga perlindungan terhadap hak asasi manusia tantangan yang harus ditangani.
 4. **Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia**
Meskipun di dalam hukum pidana militer dapat mengatur berbagai macam tindakan kriminal dlm lingkungan angkatan bersenjata, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dalam proses peradilan penegakan hukum. Perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan yang tidak manusiawi, & penggunaan kekuatan yng berlebihan tentu harus dijamin.
 5. **Keadilan dan Proporsionalitas**
Prinsip keadilan dan proporsionalitas tentu menjadi faktor penting dalam hukum pidana militer. Pengadilan militer harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan mitigasi atau pengurangan hukuman yang sesuai dengan keadaan tertentu serta memastikan bahwa sangsi yang diberikan sejalan dengan tingkat keburukan yang telah dilakukan.
 6. **Sangsi Hukum**
Sangsi hukum yang terdapat di dalam hukum pidana militer bisa terbentuk dalam berbagai macam bentuk, contohnya seperti hukuman dalam penjara, dipecat dari dinas militer, pengurangan pangkat dalam militer, dan juga sanksi dalam administratif lainnya. Bentuk sangsi ini ditentukan berdasarkan pada keputusan dari pengadilan militer dan peraturan yang telah berlaku.
 7. **Macam-Macam**
Pelanggaran dalam Hukum Pidana Militer Di dalam hukum pidana militer sudah menegaskan berbagai macam pelanggaran dalam hukum yang secara khusus terjadi di dalam lingkup militer. Dalam hal ini tentunya meliputi beberapa contoh seperti melanggar kedisiplinan, pengkhianatan terhadap sesama, disersi, penggunaan kekuatan yang tidak sah, melakukan

pencurian, kasus
penggelapan, serta
pelanggaran hukum atau
tindak pidana lainnya yang
dapat melibatkan personil
militer.

Selain dari tujuan dan aspek dari hukum pidana militer, terdapat juga beberapa prinsip dalam hukum pidana militer yang perlu juga diketahui, yaitu :

1. Prinsip Kepastian dalam Hukum Prinsip yang pertama ini tentu menegaskan bahwa hukum harus sejelas-jelasnya, harus terbuka, juga harus dapat dipahami oleh seluruh personil militer. Selain itu, tiap anggota personil militer harus memahami perbuatan apa saja yang dapat dianggap melanggar hukum khususnya pada pidana militer serta konsekuensinya.
2. Prinsip Terhadap Kesetaraan Dalam prinsip kedua, menegaskan bahwa hukum pidana militer wajib diterapkan dengan seadil-adilnya juga setiap personil militer harus diperlakukan dengan sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, dipastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan pada ras, agama, gender ataupun faktor-faktor lainnya yang tidak sesuai.
3. Prinsip Dalam Kemanusiaan Prinsip berikut ini mengarahkan pada hukum pidana militer dengan tujuan melindungi setiap hak asasi manusia dan juga tentunya menghindari perbuatan tidak manusiawi atau hal yang dapat merendahkan martabat manusia. Maka, hal ini

termasuk larangan terhadap penyiksaan atau perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap narapidana/ tahanan militer.

4. Prinsip Mengenai Kepatuhan Serta Ketatan Terhadap Perintah

Prinsip ini lebih menekankan bahwa pentingnya kepatuhan serta ketatan terhadap perintah yg berlaku dari atasannya khususnya dalam lingkungan militer. Perbuatan yang dapat melanggar hukum pidana militer tentu tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan hanya mengikuti perintah saja.

5. Prinsip Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Tentunya dalam hukum pidana militer wajib diterapkan dengan cara transparan & proses peradilan militer harus akuntabel. Personil militer harus memiliki akses pada informasi yang ada tentang proses hukum yg dihadapi oleh tiap personil serta mekanisme dalam pengawasan dan banding harus tersedia guna untuk menjaminya keadilan.

6. Prinsip Perlindungan terhadap Warga Sipil

Hukum pidana militer tentunya harus melibatkan prinsip perlindungan terhadap warga sipil yang ikut terlibat dalam konteks operasi militer atau konflik bersenjata. Perlindungan terhadap setiap hak dan kepentingan terhadap warga sipil tentu harus

menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana militer.

7. Prinsip dalam Penegakan Hukum yang Efektif
Hukum pidana militer harus diterapkan secara efektif & benar untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan dengan profesionalitas dari para ahli yang memadai.
8. Prinsip Dalam Kepentingan Nasional dan Keamanan Negara
Hukum pidana militer harus sejalan bersama dengan kepentingan nasional serta keamanan negara. Tindakan pidana militer harus memiliki tujuan untuk menjaga keamanan nasional dan juga stabilitas negara serta harus melindungi kepentingan nasional baik dari ancaman internal & eksternal.
9. Prinsip Terhadap Kehormatan Militer
Prinsip yang dilakukan terhadap kehormatan militer dapat mendorong personil militer untuk melakukan tindakan sesuai dengan standar etika dan moral yang cukup tinggi. Pelanggaran yang dilakukan terhadap kehormatan militer contohnya bisa seperti perilaku yang tidak profesional/ melanggar kode etik, tentu dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum pidana militer.

10. Prinsip Mengenai Proporsionalitas

Dalam prinsip ini lebih menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana dalam militer tentu harus sesuai dengan tingkat keburukan pelanggaran yang telah dilakukan. Pengadilan militer tentu wajib mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi dan memberikan sanksi yang seimbang sesuai dengan keadaan pada kasus tersebut.

Dapat diketahui juga bahwa hukum pidana umum berlaku untuk seluruh masyarakat dengan demikian hukum pidana umum juga berlaku bagi tiap personil militer. Walaupun bagi tiap personil militer yang melakukan perbuatan tindak pidana berlaku berbagai macam ketentuan hukum pidana umum, akan tetapi dalam konteks militer terdapat beberapa ketentuan yang tidak pas dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Berbagai macam ketentuan yang khusus tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dengan diaturnya setiap peraturan khusus di dalam KUHPM tersebut, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur di dalam KUHP. Berikut, ada beberapa alasan dengan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan karena :

1. Terdapat beberapa peraturan khusus dan hanya dapat dilakukan oleh militer saja serta aturan tersebut bersifat asli militer dan tidak berlaku

bagi umum, contohnya misalkan disersi, menolak perintah dinas atau atasan dan yang lainnya.

2. Berbagai macam perlakuan yang bersifat cukup berat seperti beberapa contoh perlakuan tidak pidana yang ada, apabila perlakuan tersebut dilakukan oleh anggota militer di dalam beberapa keadaan tertentu, ancaman hukuman yang didapatkan dari hukum pidana umum pastinya dapat dirasakan cukup ringan.
3. Bila setiap peraturan khusus yang telah diatur di dalam KUHPM kemudian dimasukkan ke dalam KUHP dapat membuat KUHP sulit untuk digunakan karena terhadap berbagai macam ketentuan tersebut hanya tunduk pada sebagian kecil dari anggota masyarakat dan juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga dalam peradilan tersendiri yakni peradilan militer.

Pertimbangan hakim dalam menjauhkan sanksi pidana tentu dapat dilihat dari siapa yang bersangkutan. Jika sebuah tindak pidana dilakukan oleh personil militer tentunya harus menerima sanksi seperti dipecatnya dari dinas militer dengan/tanpa mencabut haknya untuk memasuki lingkungan militer, penurunan pangkat, serta pencabutan terhadap hak-hak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim tentu akan meneliti dengan melihat bagaimana latar belakang dan motivasi dari seorang personil militer yang bisa sampai melakukan tindak pidana. Hal ini akan sangat penting guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

terjadi yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan sebuah putusan. Akibat dari personil militer yang melakukan perbuatan tindak pidana tentu dapat menghancurkan dan merendahkan citra TNI di lingkungan masyarakat karena seperti yang kita ketahui bahwa institusi Tentara Indonesia atau TNI dikenal dengan kedisiplinannya dan keteladanannya yang sangat tinggi. Pada saat penjatuhan pidana di pengadilan, sikap personil militer yang bisa disebut sebagai terdakwa akan sangat mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya oleh hakim. Maka dari itu, jika terdakwa bisa berkelakuan baik serta mengakui setiap tindakan yang dilakukan, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak memperberat hukuman terdakwa. Akan tetapi, jika terdakwa sulit untuk mengakui perbuatannya atau tidak mengakui perbuatannya maka pemberatan terhadap hukumannya sudah seharusnya untuk diterimanya.

KESIMPULAN

Uraian dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama bahwa hukum pidana militer dapat dilaksanakan dengan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Tentu pada dasarnya hukum pidana militer dapat memberikan pengertian secara sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana militer maupun hukum pidana militer sesuai pada ditetapkan pada pasal 1 KUHPM. KUHPM dikhususkan untuk personil militer apabila terjadi tindak pidana murni (seperti insubordinasi dan disersi) akan tetapi,

anggota militer tetap harus mentaati dan tunduk pula pada KUHP yang berlaku baik bagi masyarakat sipil & militer, dengan kata lain militer menggunakan 2 kitab undang-undang yaitu KUHP dan KUHPM. Selanjutnya yang kedua, penerapan hukum pidana militer terhadap personil militer atau sebagai pelaku tindak pidana, ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP karna aturan tersebut sering dipandang kurang memenuhi persyaratan keadilan. Oleh karena itu, dalam penegakkan hukum yang lainnya seperti KUHPM tentu harus diperkuat lebih lagi. Mengenai pembahasan diatas mengenai tujuan, aspek dan prinsip-prinsip dlm hukum pidana militer tentu harus dapat dipahami lebih dalam lagi oleh seluruh masyarakat sehingga personil militer yang telah melakukan tindak pidana terhadap masyarakat harus dihukum dengan se adil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sianturi, SR. Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985)
- [Artikel Online] diunduh dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidanamiliter/https://hukum.uma.ac.id/2021/08/07/hukum-pidana-militer-di-indonesia/>
- [Artikel Online] diunduh dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/di_rektori/index/kategori/pidana-militer1.html
- [Artikel Online] diunduh dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-pidanamiliter/>